

**PELAKSANAAN TUGAS CAMAT DALAM PEMBINAAN BADAN
PERMUSYAWARATAN KEPENGHULUAN (BPK) DI KECAMATAN
KUBU KABUPATEN ROKAN HILIR**

Oleh:

Harmain

Harmain_us@yahoo.com

Pembimbing: Dra, Ernawati. M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya jl. H.R. Soebrantas KM. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru

288293-Telp/Fak. 0761-63277

ABSTRACT

The Kubu district Kabupaten Rokan Hilir its still not good coaching that dilakukan by the District Head of the Consultative Body Kepenghuluan Kubu Kubu Sub Rokan Hilir.

The theory used in the Head Coaching Duties Consultative Body Kepenghuluan Rokan Hilir District of camp, john suprihartono 1998 in his book entitled ratings execution of work and employee development, Yoyakarta LP3C publisher. Mastery of tasks, ability to work together, Ability finish work on time, reports on the existence of proper work.

The purpose of the study, to investigate the implementation of tasks in the Guidance Consultative camat Kepenghuluan (CPC) in the district of Kubu Rokan Hilir. To determine what factors memghambat camat execution of tasks in coaching Kepenghuluan Consultative Body (BPK) in the district of Kubu Rokan Hilir.

The method used in this thesis is to use qualitative descriptive methodology.

From the research that I did, that the execution of tasks in Development Consultative Body Head Kepenghuluan Kecamatan Kubu, when seen from the results of interviews with several sources and some of the data that complements it can be said to be less good. Thus it can be seen also one of the few data and as well as the results of interviews which have implementation tasks, however not been able to arrive at a satisfactory level. So that every performance yang done in quality is not maximized for the benefit of society.

Keywords: Development, Human Resources and Infrastructures

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia melalui otonomi daerah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan daerah berdasarkan wewenangnya masing-masing yang mana telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah mengalami perubahan pertama melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

Pemerintahan daerah di Indonesia mengalami perubahan seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah. Sebelum menerapkan otonomi daerah, Indonesia menggunakan sistem sentralisasi, dimana seluruh keputusan berada di pemerintahan pusat. Sistem ini dianggap tidak berhasil karena selain terjadi ketidakseimbangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain, juga secara umum daerah perkembangannya sangat lambat karena lebih banyak menunggu kebijaksanaan dari pemerintah.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi

nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan.

Desentralisasi dianggap sebagai sistem yang tepat diberlakukan karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang besar sehingga urusan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Siswanto Sunarno, 2009: 7).

Sistem ini lebih efektif karena sistem ini lebih cepat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di daerah tanpa menunggu putusan dari pemerintah pusat. Dalam otonomi daerah, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini mengatur mengenai pembagian fungsi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tentang

Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas beberapa kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 126 dijelaskan bahwa:

1. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
2. Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
3. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum
 - c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan

pemerintahan di tingkat kecamatan

4. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, termasuk BPK (Badan Permusyawaratan Kephughluan)
5. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.
6. Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
8. Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada camat.
9. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah

Camat Kecamatan kubu diharuskan untuk tetap melakukan pembinaan terhadap aparatur pemerintahan kepenghuluan

khususnya badan permusyawaratan kepenghuluan (BPK). Melihat dari tingkat pendidikan BPK dikecamatan kubu yang masih kurang baik.

Berikut adalah tabel tingkat pendidikan BPK Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir tahun 2015

pemilihan penghulu, menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi, masyarakat, menyusun tata tertib badan permusyawaratan kepenghuluan. Pada tabel 1.2 dapat dilihat target dari pelaksanaan tugas

Tabel 1.1
Tingkat pendidikan Staf BPK di
Kec. Kubu kabupaten Rokan Hilir

NO	Desa	Tingkat Pendidikan			Jumlah	Persentase
		SD	SLTP	SLTA		
1	Sungai Kubu	1	2	4	7 orang	17.94%
2	Tanjung Lumba-lumba	-	2	4	6 orang	15.32%
3	Teluk Merbau	1	1	5	7 orang	17.94%
4	Sungai Segajah	1	1	5	7 orang	17.94%
5	Tanjung Leban	-	1	4	5 orang	12.82%
6	Teluk piyai	1	1	4	7 orang	17.94%

Sumber data: Kantor Camat Kubu Kabupaten Rokan Hilir, 2015

Pada tabel 1.1 dapat dilihat Potensi sumber daya manusia yang bertugas di Kantor Kecamatan Kubu tersebut. Hal ini dapat untuk menilai bagaimana kondisi pekerjaan dengan sumber daya yang dimiliki, kesesuaian tugas ataupun tanggung jawab seharusnya diikuti dengan kemantapan dan kemampuan dan jumlah sumber daya manusia itu sendiri.

Adapun tugas yang harus dilakukan BPK adalah membahas rancangan peraturan kepenghuluan bersama penghulu, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kepenghuluan dan peraturan penghulu, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian penghulu, Membentuk panitia

Tabel 1.2
Pelaksanaan Tugas BPK di
Kec.Kubu Kabupaten Rokan Hilir

N O	Pelaksanaan Tugas	Target	Target Selesai
1	Membahas rancangan peraturan kepenghuluan bersama penghulu	Januari 2014	Maret 2014
2	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan kepenghuluan dan peraturan	April 2014	Juni 2014

	penghulu		
3	Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian penghulu	Juli 2014	Agustus 2014
4	Membentuk panitia pemilihan penghulu	Agustus 2014	September 2014
5	Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi Masyarakat	November 2014	Desember 2014
6	Menyusun tata tertib badan permusyawaratan kepenghuluan	Februari 2015	Maret 2015

Sumber: Kantor Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir, 2015

Pada tabel 1.2 diatas dapat dilihat tahapan penyelesaian pelaksanaan tugas BPK dari Administrasi sampai pembinaan kepada masyarakat.

Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir No 4 Tahun 2009 tentang Badan Permasyarakatan Kepenghuluan:

- a. Pemerintahan kepenghuluan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kepenghuluan

- dan badan permusyawaratan kepenghuluan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Penghulu adalah kepala kepenghuluan dan perangkat kepenghuluan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kepenghuluan.
- c. Badan Permasyarakatan Kepenghuluan, selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kepenghuluan.

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Rokan Hilir No 4 Tahun 2009 tentang Badan Permasyarakatan Kepenghuluan tugas pokok BPK mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Karena apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah kecamatan tersebut belum terlaksana dengan maksimal. Melalui skripsi ini akan diteliti sejauh mana pelaksanaan tugas Camat dalam pembinaan badan permusyawaratan kepenghuluan (BPK) di kecamatan kubu kabupaten Rokan hilir

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi permasalahan yang menjadi pokok penelitian peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Tugas Camat dalam Pembinaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir?
2. Faktor-faktor apakah yang Menghambat Pelaksanaan Tugas Camat dalam Pembinaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Camat dalam Pembinaan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang Menghambat Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK) di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis
 - a. Pengembangan ilmu khususnya tentang teori administrasi yaitu Pelaksanan Tugas Camat Dalam Pembinaan

Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK)

- b. Sebagai refrensi bagi peneliti yang melakukan kajian yang sama

2. Manfaat secara praktis Sebagai Rekomendasi bagi pembuat kebijakan yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pembinaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPK)

1.5 Konsep Teori

1.5.1 Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan Tugas adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan pegawai yang telah dibebankan kepadanya .

Menurut **Jhon Suprihartono (1998:99)** indikator keberhasilan pelaksanaan tugas adalah:

1. Penguasaan tugas
2. Kemampuan bekerja sama
3. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya
4. Adanya laporan hasil kerja yang tepat

3.2 Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Kecamtan Kubu.

- 3.2.1. Sumber Daya Manusia Sumber Daya Manusia yang di maksud disini adalah keseluruhan Aparatur Pemerintahan Kecamatan Kubu yang masih kurang berkecimpung dalam

melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Dikarnakan tingkat pendidikan serta pemahaman terhadap yang ingin dilaksanakan kurang memadai sehingga terkesan kurang peduli, sebagai aparatur yang bertugas untuk kepentingan masyarakat harus mempunyai inisiatif menjalankan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, haruslah ditanamkan sebagai bentuk tanggung jawab dari pekerjaan yang telah ditugaskan dan diamanatkan untuk melayani kepentingan masyarakat. Faktor kesadaran sangat mempengaruhi kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang akan berdampak positif bagi kinerja individu maupun organisai sehingga pencapaian terhadap visi dan misi serta tujuan organisasi akan mejadi optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kesadaran individu dalam tugas masing-masing sangatlah diperlukan karena dengan begitu tugas yang diberikan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Kesadaran akan kedisiplinan adalah hal yang sangat diutamakan terutama disiplin terhadap aturan yang telah ditetapkan

3.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasaran merupakan hal yang terbilang penting untuk Melaksanakan Pembinaan Terhadap Badan Permusyawaratan Kepenghuluan , tanpa sarana dan prasarana yang memadai proses pembinaan tidak akan berjalan dengan lancar dan maksimal, dan sulit untuk menghasilkan aparatur pemerintahan kepenghuluan sebagai mana yang diinginkan.

3.2.3. Rentang Kendali/Kondisi Geografis

Rentang Kendali/ Kondisi Geografis yang dimaksud disini ialah Camat selaku kepala kecamatan jika ingin melakukan pembinaan terhadap badan permusyawaratan kepenghuluan, harus mempertimbangkan jarak rumah dari tiap-tiap anggota BPK ketempat yang disediakan untuk melakukan pembinaan. Mengingat kondisi geografis kecamatan kubu, jarak antara desa satu dengan desa yang lain nya berjauhan, tidak semua anggota BPK memiki fasilitas untuk menempuh perjalanan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengkajian data secara deskriptif. Dimana metode ini diartikan sebagai metode yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian baik seseorang, lembaga, masyarakat, dan sebagainya yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati

untuk mendapatkan data yang aktual dari. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. informan.. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir dengan melibatkan sejumlah informan penelitian ditetapkan secara sengaja pada subyek yang dianggap menguasai dan memiliki kemampuan untuk memebrikan informasi tentang masalah yang diteliti.

Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, maka data yang diperlukan antara lain :

- a. Data primer
Yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian yang langsung terjun kelokasi penelitian untuk mencari data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, hal ini dilakukan dengan wawancara kepada responden
- b. Data sekunder
Yaitu dengan mempelajari dan menelaah buku-buku,majalah, tulisan karya ilmiah maupun data –data yang ada relevansinya dan sesuai dengan masalah yang diteliti, hal ini dilakukan melalui studi pustaka yang membantu menemukan teori-teori yang mendukung peneliti

Analisis dimaksud dengan mengorganisasikan data yang terkumpul dan terdiri dari catatan

lapangan serta komentar peneliti mengenai dokumentasi, dokumen, laporan serta opini narasumber yang ada di lapangan. Kemudian analisis data yang dilakukan dengan mengatur, mengelompokkan, mengkategorikan dan mengelola data tersebut yang bertujuan untuk menemukan tema hipotesis penelitian sehingga dapat menjadi teori substansi.

HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Camat dalam Pembinaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir. Dalam penelitian ini penulis akan menyajikan data-data yang di peroleh dari hasil penelitian oleh kantor camat kecamatan kubu,Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kecamatan, Badan Permusyawaratan Kepenghuluan di Kecamatan kubu. Kualitas Pelaksanaan tugas yang baik mampu memberikan hasil yang optimal dalam pencapaian tujuan yang memuaskan, oleh karna itu dalam pelaksanaan tugas harus harus bersungguh-sungguh sehingga tugas yang dilakukan mremiliki kualitas dan bermutu.Untuk itu dengan menggunakan pertanyaan melalui daftar pertanyaan (wawancara) kepada informan sebagai sampel penelitian ini kiranya dapat memberikan penilaian terhadap pelaksanaan tugas Camat dalam Pembinaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan didalam wawancara ini menyangkut tentang kualitas pelaksanaan tugas dengan

berdasarkan kepada indikator-indikator yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.

Proses Pada Pelaksanaan Tugas adalah salah satu faktor penentu dalam mencapai pelaksanaan tujuan yang efektif. Pencapaian tujuan yang berhasil menjadi sebuah ukuran yang tepat dan baik. Namun demikian agar pencapaian tujuan bisa menjadi ukuran yang sah dalam mengukur tugas.

3.1.1. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi. Jadi pelaksanaan tugas artinya mengerjakan tugas dengan sendirinya atau dengan kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dikehendaki dalam organisasi secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan. Pelaksanaan tugas adalah Pelaksanaan untuk bekerja.

Untuk melaksanakan secara fisik kegiatan dari aktivitas tersebut, maka pemimpin mengambil tindakan-tindakannya kearah itu. Seperti : Leadership

(pimpinan), perintah, komunikasi dan conseling(nasehat). Pelaksanaan tugas disebut juga “gerakan aksi” mencakup kegiatan yang dilakukan seorang pemimpin untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai. Dari seluruh rangkaian proses manajemen,

pelaksanaan tugas merupakan fungsi manajemen yang paling utama.

Hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan tugas ini adalah bahwa seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika. Merasa yakin akan mampu mengerjakan, yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya, Tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak, Tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan Hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis.

Pelaksanaan tugas merupakan bentuk realisasi dari tanggung jawab (tugas) yang telah di emban oleh tiap pegawai pemerintahan yang menjalankan tatanan pemerintahan sesuai dengan rencana dari tiap organisasi, sesuai dengan bidangnya masing-masing.

3.1.2. Kemampuan Bekerja Sama

Kemampuan bekerja sama adalah potensi atau kesanggupan dalam kerja antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan interaksi yang paling penting karena pada hakikatnya manusia tidaklah bisa hidup sendiri tanpa orang lain sehingga ia senantiasa membutuhkan orang lain. Kerja sama dapat berlangsung manakala individu-individu yang bersangkutan memiliki kepentingan yang sama dan memiliki kesadaran untuk bekerja sama guna mencapai kepentingan mereka tersebut.

3.1.3. Kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya

Kemampuan menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya yang dimaksud disini adalah Camat menjalankan tugas nya sebagai Kepala Kecamatan dikantor Kecamatan maupun sebagai Pimpinan bagi Aparatur Pemerintahan Kepenghuluan. Agar tugas nya sebagai Camat dapat diselesaikan dengan baik melalui kinerja dari bawahan nya dan penyelesaian pekerjaan itu terealisasi terlihat dari terlaksananya tugas Camat maupun tugas Aparat lain nya yang ada ditingkat Kecamatan dibawah pimpinan nya.

3.1.4. Adanya laporan hasil kerja yang tepat

Laporan hasil kerja yang dimaksud disini adalah laporan program-program yang telah direncanakan organisasi Kecamatan maupun program-program kerja yang berasal dari aparatur yang ada ditingkat Kepenghuluan. Kualitas Pelaksanaan tugas yang baik mampu memberikan hasil yang optimal dalam pencapaian tujuan yang memuaskan, oleh karna itu dalam pelaksanaan tugas harus harus bersungguh-sungguh sehingga tugas yang dilakukan memiliki kualitas dan bermutu.

4.1. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan , bahwa Pelaksanaan Tugas Camat Dalam Pembinaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan Kecamatan

Kubu Kabupaten Rokan Hilir, jika dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber dan beberapa data yang melengkapi maka dapat dikatan kurang baik. Demikian hal ini dapat dilihat juga salah satu satu dari beberapa data dan maupun hasil wawancara telah terlaksananya tugas, Namun demikian belum mampu sampai pada tingkat memuaskan. Sehingga setiap kinerja yang terlaksana belum maksimal secara kualitas bagi kepentingan masyarakat .

2. Bahwa faktor-faktor yang memberikan pengaruh dominan terhadap pelaksanaan tugas camat dalam pembinaan badan permusyawaratan kepenghuluan adalah sebagai berikut.
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Sarana dan prasarana
 - c. Geografis/Rentang Kendali

Ketiga faktor diatas sangat menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas Camat dalam Pembinaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, jika salah satu faktor kurang maka besar kemungkinan pelaksanaan tugas dalam pembinaan akan terkendala dan sulit mendapatkan hasil yang maksimal.

4.2. Saran

Dari hasil penelitian dan dari pembahasan ,Pelaksanaan Tugas Camat dalam Pembinaan Badan Permusyawaratan Kepenghuluan

(BPK) di Kecamatan Kubu, Peneliti bermaksud memberikan saran dan harapan saran yang disampaikan dapat di terima dan menjadi evaluasi bagi Camat Kecamatan Kubu beserta aparat desa.

- a. Agar Camat Kecamatan Kubu dapat menyelenggarakan Pelaksanaan Tugas dalam Pembinaan Badan Permusyawaratan Kependhuluan. Sehingga Kemampuan pegawai, baik dilihat dari segi pendidikan, pengetahuan, dan pelatihan harus menjadi prioritas utama. Karena dengan sumber daya manusia yang memadai dan mendukung, maka seluruh program kerja yang direncanakan akan bisa terealisasi dengan baik. Kemudian juga sasaran dan setiap program kerja bisa dirasakan oleh masyarakat luas setiap manfaatnya.
- b. Agar Camat Kecamatan Kubu bisa menghasilkan kinerja yang baik, peran pimpinan dalam mengawasi dan memotivasi pegawai sangat diperlukan. Sesibuk apapun seorang pemimpin, pegawai tetap membutuhkan peran seorang pimpinan, sebagai tempat memberikan inspirasi serta sebagai motivator terhadap para pegawai. Seperti yang disampaikan pada saran di atas, sumber daya manusia yang ada, melalui kemampuan pegawainya juga harus dikontrol agar selalu semangat dan konsisten memberikan kinerja yang baik dan amanah. Peran pimpinan sangat penting dalam mengarahkan tujuan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Aimufatmi.2013. *Hubungan Antara Pengawasan Melekat dengan Kinerja Pegawai pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Kota Samarinda*.E-Journal Administrasi Negara, Volume 1, Nomor 2, 2013: 351-364.
- Anwar, Khairul .2014. *Kebijakan Pemerintah Terhadap Pelestarian Hutan*.Jom FISIP Vol. 1 No. 2 Oktober 2014.
- As'ad, Moch. 2000. *Psikologi Industri*. Jogjakarta: Liberty.
- Daryanto, Abdullah.2013. *Pengantar Ilmu Manajemen dan Komunikasi*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Dharma, Agus. 1985. *Gaya Kepemimpinan yang Efektif Bagi Manajer*. Jakarta: SinarBaru.
- Hanif, Nurcholis. 2007. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta.
- Jamaluddin, Ibnu.2009. *Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan*. Bandung : APDN Press.
- Moekijat. 1993. *Personal Management*. Bandung: Alumni Bandung.
- Nawawi, Hadari.2003. *Metode Penelitian Bidang Sosial*.

- Yogyakarta:Gajah
MadaUniversity
- Robbins, 2006. *Perilaku organisasi ed.12*. Jakarta: salemba
- Salam, Faisal.
2003.*PengembanganSumber Daya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saputra ,Anggi dan Muhammad Ridwan.2012.*Pelaksanaan Tugas Camat DalamMembina Penghulu dan Perangkat Kepenghuluan Batu Hampar Kecamatan Tanah Putihtanjung Melawan Kabupaten Rokan Hilir*.Pekanbaru UR
- Siagian. 2009.*Filsafat Admnistrasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sinambela, Lijan. Pdkk. 2011. *ReformasiPelayanan Publik*. Jakarta: BumiAksara.
- Siswanto, Sunarno. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.